

DINAMIKA POLITIK DALAM PERSPEKTIF KEPEMIMPINAN DI INDONESIA

Winda Marliani¹
Siti Nurhalimah²

wmarliani2@gmail.com¹
halimsitinurhalimah@gmail.com²

Universitas Suryakencana

Abstrak

Negara Indonesia merupakan suatu negara yang telah lama merdeka yang dapat mempertahankan kemerdekaannya hingga saat ini. Berdasarkan sejarah kemerdekaan negara Indonesia, tentu tidak terlepas dari adanya berbagai unsur politik di dalamnya. Negara Indonesia sudah beberapa kali dipimpin oleh berbagai aktor pemimpin dengan latar belakang yang berbeda, dari mulai orang sipil sampai dengan orang militer. Setiap pemimpin yang menjalankan pemerintahannya memiliki berbagai karakteristik yang berbeda dalam hal kepemimpinan maupun dalam menjalankan pemerintahannya. Oleh karena itu, dinamika politik di Indonesia yang telah dilaksanakan dari berbagai fase, mulai dari masa orde lama, orde baru, dan masa reformasi sampai saat ini memiliki strategi dan karakter masing-masing dalam pemerintahannya dengan cara dan kekuasaannya dalam memimpin negara Indonesia dari masa ke masa. Kehidupan dinamika politik tersebut dilakukan dengan harapan dapat mewujudkan pemerintahan ke arah yang lebih baik (*good goverment*).

Kata Kunci: *Kepemimpinan, Dinamika Politik, Good Goverment.*

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di setiap aspek lingkungannya kita tidak akan terlepas dengan berbagai unsur politik, baik politik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bahkan negara. Setiap kehidupan yang kita jalani tersebut tentunya akan selalu berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan jaman pada saat ini. Begitupun dengan kehidupan bernegara yang lebih luas cakupannya dengan berbagai unsur dan dinamika politik

di Indonesia yang sudah lama mendapatkan serta mempertahankan kemerdekaannya hingga saat ini, seharusnya sudah banyak perubahan yang lebih baik daripada sebelumnya dari berbagai aspek kehidupan.

Dalam sejarah, negara Indonesia merupakan suatu negara yang berhasil mendapatkan kemerdekaannya kembali setelah terlepas dari belenggu penjajahan bangsa lain. Unsur terbentuknya suatu negara yaitu adanya rakyat, wilayah, serta pemerintahan yang berdaulat. Oleh karena itu, setiap negara sudah barang tentu harus memiliki pemimpin yang dipercaya untuk memimpin dan menjalankan pemerintahannya di dalam suatu negara yang merdeka. Dinamika politik di negara Indonesia dalam hal pemerintahannya sudah beberapa kali dipimpin oleh berbagai jenis kalangan, baik sipil maupun militer.

Kehidupan politik dalam hal pemerintahan di negara Indonesia telah mengalami beberapa perubahan yang diantaranya terbagi pada masa orde lama, orde baru, dan reformasi sampai sekarang. Di setiap masa pemerintahan yang dijalankan memiliki perbedaan yang cukup signifikan karena setiap pemimpin pada masa orde lama, orde baru, dan reformasi semuanya memiliki karakteristik atau ciri khas masing-masing dalam kepemimpinan maupun dalam menjalankan pemerintahannya. Oleh karena itu, dinamika politik dalam hal pemerintahan di negara Indonesia ini cukup beragam karena dari masa ke masa, kehidupan politik di negara Indonesia seringkali berubah-ubah.

Jika berbicara tentang dinamika politik di negara Indonesia sepertinya tidak akan terbatas oleh unsur apapun, karena kehidupan yang berbau politik itu bukan hanya dilihat dari satu sudut pandang pemerintahannya saja, tetapi bisa dilihat dari berbagai aspek manapun. Dalam pemerintahan, setiap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai bersama untuk dapat mewujudkan kehidupan yang sejahtera dan lebih baik daripada sebelumnya. Dinamika politik di Indonesia dalam hal pemerintahan tentunya berupaya untuk dapat mengetahui berbagai perubahan, karakteristik kepemimpinan dalam masa pemerintahan yang terdahulu hingga masa pemerintahan saat ini. Negara yang baik adalah negara yang dapat mewujudkan

warga negara yang baik (*good citizenship*) serta pemerintahan yang baik (*good goverment*) dalam kehidupannya.

LANDASAN TEORI

Konsep Politik Indonesia

Pada dasarnya dalam kehidupan kita telah mengenal bagaimana itu kehidupan politik, namun tanpa kita sadari bahwa setiap kehidupan yang kita jalani itu tidak terlepas pada unsur-unsur politik didalamnya. Politik secara luas bukan hanya sekedar bagaimana kita mendapatkan kekuasaan tertentu dalam jabatan di pemerintahan. Akan tetapi, lebih luas dari itu pengertian kehidupan politik merupakan suatu cara bagaimana kita dapat bertahan hidup dengan tujuan yang hendak dicapai sebagai proses menciptakan kehidupan yang lebih baik.

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik (*politics*) adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Usaha menggapai *good life* ini menyangkut bermacam-macam kegiatan yang antara lain menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem, serta cara-cara melaksanakan tujuan itu. Masyarakat mengambil keputusan mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu dan hal ini menyangkut pilihan antara beberapa alternatif serta urutan prioritas dari tujuan-tujuan yang telah ditentukan. (Budiardjo, 2008 : 15).

Dari pengertian tersebut sudah jelas bahwa politik merupakan suatu usaha dalam menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima oleh kehidupan di masyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik dan harmonis. Dalam kehidupan yang kita jalani harus jelas bagaimana menentukan tujuan yang hendak kita capai. Bagaimana cara kita memperoleh sesuatu yang kita ingin dan kita butuhkan. Apakah jalan atau proses yang kita tempuh untuk mendapatkan sesuatu itu dengan cara yang baik atau sebaliknya. Oleh karena itu, politik dalam kehidupan dapat berdampak dan digunakan pada hal yang positif dan bahkan negatif. Menurut

Kartini Kartono (2009: 51), politik itu diterjemahkan sebagai pengurusan negara dan pemerintahan, sehingga kekuasaan pengurusan itu sepenuhnya ada di tangan para pejabat yang duduk di lembaga-lembaga formal (birokrasi).

Beberapa waktu yang lalu, politik diidentikkan dengan perbuatan mengendalikan negara saja. Akan tetapi di jaman sekarang, politik bukan lagi hal-hal yang berkaitan dengan negara dan pemerintah saja. Sebab, konflik, keputusan dan masalah-masalah umum sering menjadi atau dijadikan konflik politik, keputusan politik dan masalah politik. Suatu masalah menjadi masalah politik pada saat pemerintah diikutsertakan dalam penyelesaian masalah tersebut, atau justru ditolak mengadakan musyawarah terhadap penyelesaian masalahnya. Selanjutnya, kekuasaan dapat diartikan sebagai kekuatan, otoritas, dan pengaruh untuk mengatur serta mengarahkan para pengikut. Misalnya, karena punya status dan menjalankan tugas, dan mengepalai suatu unit instansi, lembaga, kelompok, organisasi, pemerintahan, negara, serta orang yang mempunyai kekuasaan. Maka sumber kekuasaan tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Kartini Kartono (2009: 32), yaitu:

1. Kemampuan dan bakat pribadi untuk mempengaruhi orang lain
2. Punya sifat-sifat unggul, sehingga seseorang memiliki kewibawaan dan pengaruh memaksa terhadap para penganutnya
3. Memiliki banyak informasi, pengetahuan, dan pengalaman luas untuk mempengaruhi orang lain
4. Punya kepandaian/keterampilan teknis-psikologis untuk menjalin relasi dan komunikasi (pandai bergaul).

Berdasarkan pendapat di atas dapat diuraikan bahwa jika kita berbicara tentang konsep dinamika politik tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai definisi dari politik itu sendiri, bagaimana sistem politik yang diterapkan di negara Indonesia, konsep kekuasaan yang diterapkan apakah sudah sesuai dengan apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan pada saat proses pelaksanaan kehidupan politik dijalankan dalam hal pemerintahan di Indonesia.

Seperti halnya dinamika politik yang ada di Indonesia, dalam hal pemerintahan setiap pemimpin yang berkuasa menjalankan pemerintahannya harus dapat menciptakan ataupun melanjutkan berbagai kebijakan yang sebelumnya telah dilakukan oleh para pemimpin negara yang sebelumnya, bahkan para pemimpin yang masih aktif dalam kepemimpinannya akan dituntut secara tidak langsung untuk mewujudkan berbagai harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidup rakyatnya. Oleh karena itu, dinamika politik di Indonesia seperti tidak akan ada ujungnya karena setiap kehidupan politik di dalam kehidupan bernegara pasti akan selalu berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan jaman dengan harapan suatu negara akan menjadi barometer yang baik bagi negara lain.

Konsep Dinamika Kepemimpinan di Indonesia

Sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, masalah kepemimpinan nasional menjadi hal yang paling penting dan berpengaruh. Dalam hal ini terutama kedudukan Presiden, karena menurut konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945, ia memiliki posisi yang kuat dan kekuasaan yang besar. Presiden Indonesia tidak hanya sebagai kepala negara tetapi juga sebagai kepala pemerintahan dan panglima perang tertinggi dalam suatu negara.

Dalam konteks tersebut, ada baiknya kita melihat dan membandingkan para sosok pemimpin yang pernah menjabat di negara Indonesia dalam kaitannya dengan corak kehidupan masyarakat yang dipimpinnya. Sedapat mungkin juga akan diungkapkan tentang karakteristik kepemimpinan dalam merespons realitas dan problematika sosial pada setiap jamannya. Hal ini penting untuk melihat karakter pribadi dari seorang pemimpin dan teladan apa, terutama kebaikan dan kebijakan yang bisa diambil oleh masyarakat Indonesia dari para pemimpin bangsanya. Dalam hal kepemimpinan, menurut Hunneryager dan Heckman (1992: 9) dalam Idrus (2011: 61) mengatakan bahwa Uji coba kepemimpinan mengemukakan empat tipe pemimpin, keempat tipe tersebut adalah (1) tipe

kepemimpinan diktatoris, (2) tipe kepemimpinan otokratis, (3) tipe kepemimpinan demokratis, (4) tipe kepemimpinan *leissez-faire*, yang bergantung pada bawahan.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diuraikan bahwa, tipe kepemimpinan diktatoris menampilkan otoritas atasan sebagai penggerak bawahan. Pemimpin diktatoris menguasai bawahan dengan ancaman hukuman seperti pemberhentian, penurunan pangkat, penilaian rendah sehingga menghalangi promosi atau kenaikan gaji. Kepemimpinan ini berangkat dari asumsi bahwa para bawahan diberikan motivasi agar mengerjakan apa saja yang diperintahkan pemimpinnya.

Kepemimpinan otokratis menampilkan gaya kepemimpinan dengan cara memusatkan otoritas dan pengambilan keputusan pada pimpinan. Pemimpin berkuasa penuh dan bertanggungjawab atas pekerjaan yang harus dilakukan. Bawahan dalam model kepemimpinan seperti ini tidak diizinkan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan tidak boleh melakukan penyimpangan. Sementara kepemimpinan demokratis bertumpu pada kekuasaan dan pengambilan keputusan. Pemimpin berusaha mendorong bawahannya untuk berfungsi sebagai unit sosial dan memanfaatkan bakat serta kemampuan anggota sepenuhnya. Sedangkan tipe kepemimpinan *laissez faire* menunjukkan ciri-ciri dengan serba tidak tegas. Pemimpin membiarkan masing-masing kelompok memantapkan tujuan dan keputusannya. Satu-satunya kontak antar mereka adalah di saat para pemimpin menyampaikan informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Pemimpin memberikan sedikit motivasi untuk memperoleh usaha secara menyeluruh.

Selain itu, di dalam konsep kepemimpinan di negara Indonesia, kita harus mengetahui serta dapat membedakan apa saja dan bagaimana karakteristik seorang pemimpin di dalam menjalankan kepemimpinannya. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa sudut pandang yakni dari segi konfigurasi politiknya dan dari segi karakter produk hukum yang diterapkan oleh masing-masing pemimpin pada jamannya.

Konfigurasi politik demokratis adalah susunan sistem politik yang membuka kesempatan (peluang) bagi partisipasi rakyat secara penuh untuk ikut aktif menentukan kebijakan umum. Partisipasi ini ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjadinya kebebasan politik. (Mahfud MD, 1998: 24).

Selanjutnya, Mahfud MD (1998: 25) mengemukakan tentang pengertian dari konfigurasi politik yang bersifat otoriter, yaitu: Konfigurasi politik otoriter adalah susunan sistem politik yang lebih memungkinkan negara berperan sangat aktif serta mengambil hampir seluruh inisiatif dalam pembuatan kebijaksanaan negara. Konfigurasi ini ditandai dengan dorongan elit kekuasaan untuk memaksakan persatuan, penghapusan oposisi terbuka, dominasi pimpinan negara untuk menentukan kekuasaan politik oleh elit politik yang kekal, serta di balik semua itu ada satu doktrin yang membenarkan konsentrasi kekuasaan.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa konfigurasi politik demokratis atau otoriter, indikatornya adalah bekerjanya tiga pilar demokrasi, yaitu peranan partai politik dan badan perwakilan, kebebasan pers, dan peranan eksekutif. Pada konfigurasi politik demokratis, partai politik dan lembaga perwakilan rakyat aktif berperan menentukan hukum negara atau politik nasional, kehidupan pers relatif bebas, sedangkan peranan lembaga eksekutif (pemerintah) tidak dominan dan tunduk pada kemauan-kemauan rakyat yang digambarkan lewat kehendak lembaga perwakilan rakyat. Pada konfigurasi politik otoriter yang terjadi justru malah sebaliknya.

Kemudian, jika berbicara tentang konfigurasi politik yang diterapkan dalam kepemimpinan seseorang di suatu negara, akan berkaitan dengan yang disebut karakter produk hukum yang dilaksanakan. Konfigurasi politik demokratis biasanya dipasangkan dengan karakter produk hukum yang bersifat responsif, adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Sedangkan, konfigurasi politik yang otoriter biasanya dipasangkan

dengan karakter produk hukum yang bersifat ortodoks, adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan keinginan sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah. Berlawanan dengan hukum responsif, hukum ortodoks lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok maupun individu-individu di dalam masyarakat. Dalam pembuatannya peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil.

Negara Indonesia seperti yang kita ketahui, memiliki beberapa dinamika politik dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dinamika politik tersebut terbagi ke dalam beberapa rezim atau masa, yaitu masa orde lama, orde baru, dan reformasi sampai sekarang. Menurut Gatara dan Said (2011: 68), mengatakan bahwa pengertian rezim dalam kamus politik, rezim adalah pemerintahan yang berkuasa. Sementara dalam pengertian populernya, rezim sering dikatakan sebagai orang atau sekelompok orang yang menguasai negara.

Setelah kemerdekaan negara Indonesia, pada saat awal kemerdekaan, negara Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer, seiring dengan beberapa kali pergantian konstitusi negara sampai kembali lagi ke UUD 1945 sampai saat ini. Proses pengambilan keputusan dalam demokrasi dipimpin didasarkan pada musyawarah dan mufakat serta semangat gotong-royong di bawah kepemimpinan Soekarno sebagai penguasa yang otoriter. Bersamaan dengan penjelmaan kepemimpinan otoriter Soekarno, ada dua kekuatan lain yang mengokohkan kekuatan politiknya (di atas melemahnya partai-partai lain) yaitu Angkatan Darat dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Sehingga pada masa itu, ada tiga kekuatan politik yang saling tarik menarik yaitu Soekarno, Angkatan Darat, dan PKI. (Mahfud MD, 1998: 128).

Masa orde lama ditandai dengan adanya sosok pemimpin negara sekaligus bapak proklamator Indonesia yang pertama yaitu Soekarno. Pada masa kepemimpinan orde lama, Soekarno dipandang sebagai sosok pemimpin yang tegas dan keras dalam kepribadiannya maupun dalam kepemimpinannya.

Sehingga dalam kepemimpinannya Soekarno dipandang sebagai pemimpin yang bersifat otoriter. Selama kurun waktu 1959-1965 Presiden Soekarno dengan sistem demokrasi terpimpinnya menjelma menjadi seorang pemimpin yang otoriter. Partai-partai yang pernah marak pada era demokrasi parlementer secara praktis menjadi lemah dan tak berdaya, kecuali PKI yang dapat memperluas pengaruhnya dengan berlandung di bawah kekuasaan Soekarno, sementara Angkatan Darat dapat memperluas peran dan kekuasaan politiknya. Selain itu, tingkah laku Soekarno semasa demokrasi terpimpin jauh menyimpang, bahkan bertentangan dengan pemikiran politiknya sendiri. Di puncak kekuasaannya, Presiden memperlihatkan tingkah laku yang sewenang-wenang, itu semua menyebabkan timbulnya penilaian bahwa tingkah laku politik Soekarno telah menyeleweng dari demokrasi Pancasila dan lebih dari itu mengandung ciri otoriter.

Selanjutnya, setelah jatuhnya masa kepemimpinan pada orde lama dikarenakan adanya peristiwa G30 S/PKI pada saat itu telah meruntuhkan konfigurasi politik era demokrasi terpimpin yang bersifat otoriter itu. Pengkhianatan tersebut mengakhiri cerita di antara tiga kekuasaan politik Soekarno, Angkatan Darat, dan PKI. Dalam dinamika era demokrasi terpimpin yang ditandai dengan tampilnya militer sebagai pemenang. Soekarno diberhentikan secara konstitusional oleh MPRS karena dianggap tidak dapat memberi pertanggungjawaban atas musibah nasional G30 S/PKI, sedangkan PKI dibubarkan dan dinyatakan sebagai partai terlarang karena telah mengkhianati negara. Militer tampil sebagai pemeran utama dalam pentas politik pada awal era orde baru, suatu era yang dipakai sebagai nama resmi pengganti era demokrasi terpimpin (1959-1966) yang disebut orde lama.

Fungsi Pancasila di era Orde Baru menjadi alat kepentingan politik penguasa. Pancasila menjadi alat legitimasi Pemerintahan Soeharto. Pemerintahan Soeharto menyebut dirinya Demokrasi Pancasila. Padahal pemerintahan pada masa itu tidak demokratis. (Siswanto, 2017: 64). Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diuraikan bahwa pada masa kepemimpinan orde baru meskipun sistem

demokrasinya dinamakan dengan demokrasi Pancasila, dalam hal kepemimpinannya masih sama saja dengan karakteristik kepemimpinan orde lama, karena dalam kenyataannya pemimpin pada masa orde baru lebih bersifat otoriter. Hal tersebut terlihat pada sistem kepartaian yang seolah dipusatkan kepada partai Golkar dan dwi-fungsi ABRI, pers yang bersifat tertutup oleh pemerintah, sehingga pada saat itu menyebabkan kurang efektifnya kepemimpinan dalam hal pemerintahan. Meskipun begitu, selama kepemimpinan orde baru, banyak masyarakat yang merasakan berbagai pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah khususnya dalam hal ekonomi. Pemerintah Soeharto membangun struktur pemerintahan otoriter dan melanggar HAM, tetapi menamakannya demokrasi Pancasila. Dia juga mengembangkan sistem ekonomi liberal, tetapi menyebutnya sistem ekonomi Pancasila. Jadi, pada saat itu telah terjadi distorsi atas eksistensi Pancasila. (Siswanto, 2017: 56).

Setelah runtuhnya kepemimpinan pada masa orde baru dikarenakan banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi yang dilakukan oleh pemerintah selama kepemimpinannya, masyarakat pada saat itu bersikeras menurunkan pemerintahan Soeharto yang sudah terlalu lama menjabat sebagai pemimpin negara Indonesia. Akhirnya karena situasi dan kondisi politik yang sudah tidak lagi stabil, Presiden Soeharto pada saat itu tepatnya tahun 1998 mengundurkan diri dari masa jabatannya yang sudah dijalankan selama 32 tahun. Berakhirnya masa kepemimpinan orde baru akhirnya lahirlah masa yang disebut dengan masa reformasi.

Masa reformasi sebagai lanjutan dari runtuhnya masa orde baru mulai ditandai dari masa kepemimpinan B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Jokowi-dodo. Sejak dimulainya kehidupan politik di era reformasi, pemerintah mulai memperkuat sistem demokrasi Pancasila yang sesungguhnya. Berbagai peristiwa yang terjadi dari masa orde lama hingga orde baru ternyata dijadikan sebagai pelajaran yang berharga didalam membenahi sistem politik dan sistem pemerintahan ke arah yang lebih baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Kegagalan Orde Baru menjadi pelajaran berharga dalam melakukan sosialisasi Pancasila dimana sosialisasi di kemudian hari hendaknya bersifat terbuka dan rasional. Sosialisasi di era reformasi menyesuaikan dengan karakter sosial masyarakat yang sangat menyadari arti penting nilai kebebasan dan demokrasi sehingga sosialisasi model Orde Baru yang indoktrinasi sudah tidak relevan. (Siswanto, 2017: 64).

Dapat kita lihat bahwasannya setiap masa ke masa sebenarnya masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda, memiliki kekurangan dan kelebihan sesuai dengan jamannya. Meskipun di era reformasi ini sosok kepemimpinannya dikatakan jauh lebih demokratis dengan menerapkan demokrasi Pancasila dan produk hukum dikatakan bersifat responsif, akan tetapi di setiap kepemimpinannya di era reformasi masing-masing pemimpin di setiap periodenya pasti memiliki dinamika politik dengan berbagai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Oleh karena itu, sebagai cerminan dari warga negara yang baik kita harus bersikap bijak didalam menyikapi segala persoalan dalam dinamika politik di negara Indonesia.

Dilihat dari segi profesi: sipil atau militer. Dari keenam Presiden RI, empat orang adalah sipil (Soekarno, B.J. Habibie, Gus Dur, dan Megawati) dan dua orang militer (Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono). Walaupun begitu, masalah hubungan “sipil-militer” ini dalam sejarah Indonesia modern cukup rumit dan dilematis. Dalam tradisi masyarakat Barat yang maju, modern, dan demokratis, dominasi kepemimpinan sipil atas militer itu merupakan realitas sosial yang tak terbantahkan. (Suwarta dan Hermawan, 2012: 150-151).

Seperti yang telah kita ketahui, sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945 sampai dengan saat ini, kita memiliki 7 orang Presiden, yakni Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Jokowi. Mereka adalah merupakan pribadi-pribadi yang unggul pada jamannya dan dipilih serta ditetapkan sebagai Presiden melalui mekanisme demokrasi yang khas di Indonesia. Ketujuh Presiden tersebut, selama

dan sesingkat apapun masa jabatan mereka, telah memberikan andil dan mewarnai corak kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan budaya bangsa Indonesia. Dengan cara, karakter, dan kemampuan masing-masing, mereka berusaha untuk menghantarkan masyarakat Indonesia ke arah yang lebih baik lagi dengan mengembangkan potensi dinamika bangsa dari dalam dengan peluang dan tantangan yang datangnya dari luar. Peran dan kiprah mereka jelas tercatat dalam sejarah negara Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dalam metode penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis studi literasi yang diperoleh dari beberapa sumber yaitu, jurnal penelitian tentang dinamika politik di Indonesia, jurnal kajian pendidikan, serta dari buku sumber tentang hal-hal yang berkaitan dengan dinamika politik Indonesia mengenai sistem politik, serta karakteristik kepemimpinan dari masa ke masa.

Dalam pembahasan, penulis melihat tentang bagaimana perkembangan politik dari masa orde lama, orde baru, dan reformasi sampai sekarang. Tulisan ini dibagi menjadi dua bagian, dalam bagian pertama tentang konsep politik, penulis memaparkan mengenai dasar pemikiran seperti definisi-definisi politik, serta sumber-sumber kekuasaan yang semestinya diterapkan dalam suatu negara, kemudian dalam bagian ke dua, penulis memaparkan tentang konsep dinamika kepemimpinan dari masa orde lama, orde baru, dan reformasi sampai sekarang.

KESIMPULAN

1. Konsep Politik Indonesia, Konsep politik di Indonesia dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan politik tentunya ada seseorang yang dianggap sebagai orang yang mampu mempengaruhi orang banyak terhadap kekuasaan yang dimilikinya di suatu negara. Dengan berbagai cara yang dilakukan demi tercapainya tujuan bersama. Seseorang yang dianggap mampu mengendalikan kekuasaannya dengan baik diharapkan dapat melukiskan warna dalam kehidupan dinamika politik di lingkungan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi tercapainya kesejahteraan bersama.

2. Konsep Dinamika Kepemimpinan di Indonesia, dari penjelasan tentang dinamika kepemimpinan di negara Indonesia di atas, maka tipe ideal bagi Presiden RI di masa yang akan datang adalah seseorang yang karena asal-usulnya yang baik, berpendidikan, beragama Islam, dari etnis apapun asal memiliki integritas pribadi yang baik, berpikiran maju dan modern, punya komitmen pada kehidupan demokrasi, memiliki visi dan sistem politik yang jelas, serta otoritasnya mampu mengintegrasikan dan mensinergikan seluruh potensi bangsa untuk mencapai kemajuan, kesejahteraan, dan kemerdekaan agar sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Tapi bagaimana dengan sosok pemimpin atau Presiden Indonesia di masa yang akan datang? Gambaran tentang sosok Presiden RI di masa depan, paling tidak menurut persepsi dan penafsiran kami sendiri setelah melihat sejarah perjalanan orang-orang penting yang pernah memimpin negeri ini, adalah sangat penting untuk dikaji dan diperdebatkan agar bangsa ini tidak kehilangan arah dan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Kemudian kaitannya dengan pembangunan karakter bangsa, tentu saja sangat relevan karena pemimpin, terutama Presiden Indonesia, adalah figur panutan dan contoh teladan bagi rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Kartono, Kartini. 2009. *Pendidikan Politik (Sebagai Bagian Dari Pendidikan Orang Dewasa)*. Bandung: Mandar Maju.
- Budiardjo Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- MD Mahfud, Moh. 1998. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Affandi, Idrus. 2011. *Pendidikan Politik (Mengefektifkan Organisasi Pemuda Melaksanakan Politik Pancasila dan UUD 1945)*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.

- Gatara, Said dan Said, Dzulkiah. 2011. *Sosiologi Politik (Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian)*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Siswanto. 2017. *Jurnal Penelitian Politik Transformasi Identitas Keindonesiaan (Transformasi Pancasila Dan Identitas Keindonesiaan Vol. 14, No. 1, Juni 2017)*. Jakarta: LIPI.
- Suwirta, Andi dan Hermawan, Candra Iyep. 2012. *Atikan Jurnal Kajian Pendidikan (Masalah Karakter Bangsa dan Figur Kepemimpinan di Indonesia Perspektif Sejarah, Vol. (2) 1 2012)*. Bandung: Minda Masagi Press.